ABSTRAK

KINERJA BANDAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI DESA DAWUAN KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

Oleh :
Acep Hamdani
Nim: 41712719
Skripsi Ini Dibawah Bimbingan :
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si

Pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang BPBD Kabupaten Karawang yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan memperhatikan hak masyarakat antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.

Studi mengenai kinerja ini mengacu pada teori kinerja Pemerintah Daerah menurut Mashun dimana terdapat 6 jenis indikator kinerja yaitu : *Input, Process, Output, Outcome, Benefit, Impact.*

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan, pertama adalah purposive yaitu aparatur BPBD dan masyarakat Desa Dawuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi bencana banjir belum berjalan dengan baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi, dari segi sarana dan prasarana yaitu peralatan yang ada belum memadai, aparatur yang ada masih belum mencukupi, aparatur kurang profesional dalam bekerja, aparatur belum memberikan kinerja yang cepat, bantuan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Karawang masih terkendala dana.

Kata Kunci :Kinerja, Penanggulangan, Bencana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan salah satu dari bentuk bencana. Bencana banjir memiliki banyak dampak dan telah menimbulkan berbagai persoalan dan kerugian, baik kerugian secara sosial maupun ekonomi. Bencana banjir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, khususnya di wilayah Indonesia. Kecenderungan meningkatnya bencana banjir di Indonesia tidak hanya menyangkut aspek luasan wilayah yang terkena bencana saja, melainkan kerugian yang dialami akibat bencana banjir juga ikut bertambah. Jika dahulu bencana banjir hanya melanda kota-kota besar di Indonesia khususnya pulau Jawa, akan tetapi pada saat sekarang bencana banjir telah melanda sampai ke pelosok tanah air. Banjir juga dapat terjadi salahsatunya ketika curah hujan yang sangat deras dan drainase yang tidak befungsi dengan baik .

Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan (limpahan) air di area tertentu sebagai akibat meluapnya air sungai, danau, atau laut yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi terhadap manusia dan lingkungan. Banjir dapat terjadi perlahan-lahan dalam waktu lama atau terjadi mendadak dalam waktu yang singkat yang disebut banjir bandang. Penyebab lain dari terjadinya bencana banjir merupakan peningkatan populasi manusia dan karena daya pikat seperti lapangan pekerjaan ataupun sarana dan prasarana yang merangsang manusia berpindah dari desa ke kota. Lahan-lahan yang sebenarnya untuk daerah

konservasi dan berfungsi sebagai menjaga kesimbangan ekosistem dan tempat tumbuhnya tanaman.

Bencana banjir tidak dapat dihindari bila musim hujan berkepanjangan telah melanda. Banyak dampak yang menyebabkan kerusakan dan dapat merugikan banyak orang bila terkena musibah banjir. Oleh karena itu perlindungan jiwa pun diperlukan bagi yang tinggal berdekatan dengan aliran sungai besar seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sungai, sehingga memiliki potensi sumber daya air yang besar. Sebagai salah satu sumber daya air, sungai memiliki manfaat untuk membantu kehidupan masyarakat sekitar, tetapi di sisi lain sungai dapat menimbulkan banjir bagi penduduk di sekitarnya. Dari sumber yang di dapat dari buku Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, Indonesia memiliki lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil, 30% dian-taranya melewati kawasan padat penduduk, yang tentunya dari hal di atas tersebut Indonesia mempunyai potensi terhadap terjadinya banjir pada wilayah permukiman yang dilalui oleh aliran sungai tersebut.

Berbicara tentang Indonesia yang mempunyai banyak Kabupaten dan Kota tentu tak dapat lepas dari salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang merupakan kabupaten berkembang dari masa lampau hingga sekarang, namun perkembangan Kabupaten Karawang pun dapat memunculkan dampak positif yaitu pembangunan

dan ekonomi namun seiring dengan pembangunan tersebut ada dampak negatif dimana dari pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan peralihan lahan yang dimana bisa memunculkan bencana salah satunya bencana banjir. Data yang di dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kejadian banjir di Kabupaten Karawang sudah terjadi sejak tahun 2000-2016.

Kabupaten Karawang memiliki 30 Kecamatan, kejadian banjir yang ada di Kabupaten Karawang sudah lama terjadi, dalam waktu yang lama ada 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Telukjambe Barat, Purwasari, Karawang Barat, Cikampek, Cilamaya Kulon dan Kecamatan Cilamaya Wetan dan 7 Desa yaitu Desa Karangligar, Desa Purwasari, Desa Dawuan Tengah, Desa Dawuan Barat, Desa Kiara, Desa Langgengsari, dan Desa Sukatani Kabupaten Karawang, yang terkena bencana banjir bila turun hujan dalam waktu lama atau kapasitas air sungai di sekitar Kecamatan melebihi kapasitas air sungai yang dapat di tampung,

Banjir terparah terjadi yaitu di Desa Dawuan ratusan rumah di daerah itu terendam dengan ketinggian air 1 meter – 1,5 meter. Sedangkan di Kecamatan Telukjambe Barat air merendam puluhan rumah dengan ketinggian sekitar 40-50 sentimeter. Menurut Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas menanggulangi bencana banjir adalah BPBD namun di luar itu ada keterlibatan dari Dinas-dinas lain lalu Perangkat

Daerah seperti Kecamatan dan Kelurahan.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kinerja aparatur. Penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan yaitu Musyadad (2015) dengan judul Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Penelitian ini mengkaji kinerja BPBD Kabupaten Lebak Provinsi Banten menanggulangi bencana banjir yang berlangsung pada tahun 2013. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori dari Hersey, Blanchard dan Johnson dengan menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden 100 orang. Penelitian ini mengkaji terhambatnya kinerja BPDB Kabupaten Lebak yang timbul dalam proses penanggulangan bencana banjir yang belum dapat sepenuhnya teratasi. Permasalahan terkait dengan alat/sarana yang belum memadai lalu keterbatasan sumber daya manusia yang professional di bidang kebencanaan khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak.

Penelitian mengenai banjir juga dilakukan oleh Efendi (2012) yang melakukan penelitian yang berjudul Kinerja Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD) Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung (Suatu Studi Dalam Penanggulangan

Bencana Banjir). Penelitian ini menggunakan teori dari Dwiyanto dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini juga berbicara kinerja BPBD Kabupaten Bandung menanggulangi banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Citarum, terjadi di daerah Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Majalaya, Cicalengka dan Rancaekek. Penelitian ini pun berbicara terhambat nya kinerja BPDB Kabupaten Bandung dikarenakan kurangnya alokasi dana dan jumlah aparatur BPBD Kabupaten Bandung. Kekurangan lainnya seperti kurang luas nya gudang BPBD Kabupaten Bandung dan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang diberikan untuk pengungsi yang kurang memadai.

Beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan dengan hasil penelitian Efendi (2012) dengan penelitian ini adalah Efendi (2012) menggunakan teori dari Dwiyanto dengan menggunakan metode kualitatif dan perbedaan penelitian yang dilakukan Musyadad (2015) menggunakan teori dari Hersey, Blanchard dan Johnson dengan menggunakan metode kuantitatif perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Lebak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menanggulangi Bencana Banjir Di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dilihat dari jenis indikator *input, process, output, outcome, benefit, impact.*?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis segala sesuatu yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran kegiatan BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis keluaran BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil BPBD Kabupaten Karawang

menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori kinerja, khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya.
2. Secara praktis
   a. Bagi peneliti, yaitu diharapkan peneliti dapat memahami dan menambah wawasan serta dapat memberikan manfaat tentang Kinerja BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
   b. Bagi pemerintah atau BPBD Kabupaten Karawang diharapkan penelitian ini menjadi salah satu data ataupun rujukan kinerja yang baik dalam menanggulangi

bencana banjir di Kabupaten Karawang.

Bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang kinerja yang dilakukan BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi bencana banjir.

Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara 2000 : 67).

Mahsun menjelaskan konsep kinerja sebagai berikut:

> Kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.(Mahsun, 2014:25)

Berdasarkan pengertian di atas kinerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang memiliki gambaran dari tingkat pencapaian dalam suatu kegiatan/program/kebijakan yang diambil dari strategi suatu organisasi. Hal ini seiring dengan yang dikemukakan oleh Prawirosentono, yang menyatakan bahwa:

> Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun

> etika. (Prawirosentono, 2008:2)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari individu atau kelompok didalam organisasi yang menjalankan kegiatan yang menghasilkan kinerja dengan berupaya mencapai tujuan individu atau organisasi dan tetap pada kebijakan atau tidak melanggar hukum.

Wirawan menjelaskan kinerja adalah "keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu" (Wirawan, 2009:5). Berdasarkan penjelasan menurut Wirawan di atas bahwa kinerja merupakan hasil yang diperoleh dari bidang-bidang perkerjaan atau profesi sesuai dengan fungsi-fungsi atau indikator-indikatornya, perolehan hasil kerja tersebut didapat dalam aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu.

Whitemore dalam Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo memberikan penjelasan bahwa "Kinerja adalah pelaksaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil". (Whitemore dalam Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2014:59). Berdasarkan penjelasan ahli di atas dapat dipahami bahwa kinerja merupakan fungsi dari seseorang yang di tuntut menghasilkan kinerja dan dituntut untuk berhasil walau dengan kebutuhan paling minim. Mangkunegara menyatakan kinerja sebagai berikut:

> Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

> tanggung jawab yang diberikan kepadanya". (Mangkunegara, 2006:9).

Berdasarkan penjelasan menurut mangkunegara diatas, kinerja juga merupakan prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang di capai dalam periode tertentu. Hasil dari kinerja tersebut dihasilkan dari fungsi-fungsi dari suatu pekerjaan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja Organisasi Publik

Organisasi merupakan suatu alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan pola tertentu yang perwujudannya memiliki kekayaan baik fisik maupun non fisik sehingga dimungkinkan terjadinya suatu konflik dalam sebuah organisasi yang dikarenakan oleh adanya ketidakselarasan tujuan dan ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagianya.

Organisasi sebagai suatu pola dari cara-cara dalam mana sejumlah orang yang saling berhubungan, bertemu muka, dan terkait dalam suatu tugas yang bersifat kompleks berhubungan satu dengan yang lainnya secara sadar menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula secara sistematis. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu yang didalamnya memiliki kinerja yang didalamnya memiliki kinerja yang baik.

Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak organisasi yang berhasil atau efektif karena ditopang oleh kinerja sumber daya manusia. Sebaliknya, tidak sedikit organisasi yang gagal

karena faktor kinerja sumber daya manusia dengan demikian ada kesesuaian antara keberhasilan organisasi atau kinerja oragnisasi dengan kinerja individu atau sumber daya manusia.

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja organisasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya. kinerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Dwiyanto berpendapat bahwa Kinerja organisasi yaitu:

> Suatu kegiatan yang penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi pelayan publik dalam mencapai misinya untuk memenuhi harapan dan memuaskan

pengguna jasa. (Dwiyanto, 2014:47).

Berdasarkan pendapat dwiyanto di atas, kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi pelayanan publik, pencapaian keberhasilan pelayanan publik tersebut agar sesuai dengan saaran dan harapan. Mahsun menjelaskan tentang kinerja organisasi sebagai berikut:

> Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *stratejic planning* suatu organisasi. (Mahsun, 2014:25).

Berdasarkan penjelasan menurut Mahsun di atas dapat di jabarkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu gambaran tentang peningkatan suatu pencapaian kegiatan organisasi. Tingkat pencapaian tersebut di lihat dari sasaran, visi dan misi dari organisasi tersebut.

Berdasarkan definisi para ahli di jelaskan bahwa definisi kinerja organisasi merupakan prestasi atau tingkat keberhasilan kelompok. Kinerja tersebut dapat diketahui keberhasilannya jika tujuan, sasaran dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja organisasi dipengaruhi strategi perencanaan mulai dari tujuan, sasaran, visi dan misi dari sebuah organisasi pelayanan publik untuk memuaskan pengguna jasa.

Pengukuran Kinerja

Pengertian menurut mahsun ”Pengukuran kinerja adalah merupakan proses untuk mengatur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan”. (Mahsun, 2006:195). KemenPAN RI Nomor

PER/O9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah menerangkan bahwa:

> Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. (KemenPAN RI Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007)

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai gambaran tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang tidak mungkin terlepas dari tujuan atau misi organisasi. Pengukuran tingkat pencapaianlah ditetapkan. Tanpa adanya pengukurna kinerja, akan sulit untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilah kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintahan.

Menurut Mahsun untuk mengukur kinerja organisasi publik indikator-indikatornya terdiri sebagai berikut :

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok Proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak beruwujud (*intangible*).
4. Kelompok Hasil (*outcome*) adalah segalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek samping.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh

yang ditimbulkan baik positif maupun negative.

(Mahsun, 2006:77-78)

Pengukuran kinerja organisasi diatas menjelaskan adanya masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dalam menentukan pencapaian kinerja organisasi. Pengukuran tersebut mulai dari adanya masukan seperti SDM, dana, dan peralatan, proses merupakan kecepatan, ketetapan dalam bekerja, keluaran yang merupakan hasil dari proses input itu sendiri yang akhirnya menghasilkan manfaat dan dampak bagi organisasi itu sendiri dan masyarakat yang keduanya saling timbal balik.

Berbeda dengan Mahsun, Dwiyanto menjelaskan untuk menilai kinerja organisasi birokrasi publik ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Indikator-indikator yang digunakan menurut Dwiyanto, yaitu :

1. Produktifitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas.

(Dwiyanto, 2008:50-51)

Model kinerja menurut Dwiyanto diatas terdapat lima faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktifitas adalah rasio antara input dengan output, merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya.

Berdasarkan pengertian di atas, indikator input menurut Mahsun terdiri dari jumlah dana, jumlah pegawai, jumlah infrastruktur dan

jumlah waktu, sedangkan indikator output terdiri dari bentuk fisik dan jasa yang dihasilkan (Mahsun, 2006:196). Pengukuran Produktivitas tersebut dapat menghasilkan perbandingan yang lebih detail antara input dan output. Kualitas layanan adalah pemberian informasi kepada masyarakat yang tersedia secara mudah dan murah.

Tingkat kepuasaan dan kesesuaian antara harapan masyarakat/ pelanggan dengan pelayanan yang diperoleh. Tolak ukur dari kualitas ini adalah tergantung pada masyarakat/ pelanggan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan.

Indikator kualitas pelayanan publik yang lain digagas oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry adalah *tangibles, reliability, assurance, empathy*. Mengenai pengukuran kualitas pelayanan (measuring service quality) dijelaskan lebih lanjut menurut Parasuraman et al sebagai berikut :

> *Consumers evaluate five dimensions of service quality; these dimensions include tangibles, reliability, assurance and emphaty. Tangibles include the service provider's physical facilities, their equipment and the appeareance of employees. Realibility is the ability of the service firm to perform the service promised dependably and accurately. Assurance refers to the knowledge and coutesy of the company's employees and their ability to inspire trust and confidence in the customer toward the service provider. Emphaty is the caring, individualized attention the service firm provides each customer (Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, 1990:26).*

Berdasarkan pendapat diatas indikator –indikator kualitas layanan dapat dijelaskan bahwa *Tangibles* (Bukti Fisik) yaitu fasilitas fisik (gedung), perlengkapan dan

peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. *Reliability* (Kehandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya terutama memberikan jasa secara tepat waktu, dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. sikap yang simpatik, dengan akurasi yang tinggi. *Assurance* (Jaminan) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan. *Empathy* (Empati) adalah memberikan perhatian secara individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen, memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry *"Responsiveness is, the willingness of the firm's staff to help customers and provide them with prompt service"* (Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, 1990:26).

Berdasarkan pengertian di atas, indikator resposnsivitas dapat di jelaskan terdiri dari adanya

kesediaan staf perusahaan untuk membantu pelanggan mengenai informasi yang jelas mengenai kegiatan pelayanan serta pelayanan secara cepat dan tepat. Sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan jelas tanpa merugikan konsumen atau masyarakat.

Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi atau prinsipprinsip administrasi. Menurut Nasution bahwa prinsif *"Responsibilitas* terdiri dari adanya Tanggung jawab dan kerjasama antara perusahaan atau *stakeholrders"* (Nasution, 2007:152).

Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi professional. Prinsip ini juga mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik dan mengakui stakeholders serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan stakeholders untuk menciptakan kemakmuran.

Akuntabilitas Merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang di pilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, Konsep akuntabilitas publik dapat di gunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Pelayanan yang berkembang

dalam masyarakat tersebut diantaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia dan orientasi pelayanan yang dikembangkan bagi masyarakat pengguna jasa. Menurut Mahsun bahwa akuntabilitas organisasi dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. *Fiscal Accountability*, Akuntabilitas yang di tuntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.
2. *Legal Accountability*, berkaitan dengan Undang-undang maupun peraturan.
3. *Program Accountability*, berkaitan dengan pencapain program-program.
4. *Proses Accountability*, berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber potensi daerah.
5. *Outcome Accountability*, berkaitan efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
   (Mahsun, 2006:85)

Indikator-indikator akuntabilitas suatu organisasi untuk melihat tingkat kesesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan. Tingkat kesesuaian tersebut yang dapat dilihat dari kesesuaian dengan undang-undang, pencapaian program, pemanfaatan sumber-sumber potensi dan pemenuhan terhadap harapan masyarakat dengan demikian akan terciptanya kinerja organisasi pelayan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adanya penilaian kinerja untuk organisasi pelayanan publik atau birokrasi publik sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut dalam memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Penilaian kinerja tersebut bermanfaat untuk memperbaiki kinerja organisasi pelayanan publik atau birokrasi publik secara terarah dan sistematis sehingga dapat

mengetahui kondisi kinerja dari organisasi tersebut.

Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi, yang dalam konteks organisasi sektor publik akan digunakan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari publik. Masyarakat akan menilai keberhasilan organisasi lewat kemampuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Mahmudi berpendapat bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

(Mahmudi, 2013:14)

Tujuan adanya pengukuran menurut pendapat di atas agar dapat mencapai tujuan organisasi, sarana kepegawaian, perencanaan ke depan, pemberian reward dan punishment dan penyemangat kerja. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor sangat penting baik untuk orang-orang yang ada di dalam organisasi maupun masyarakat yang mengggunakan layanan organisasi itu sendiri.

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik dengan menggunakan metode *top down* dan *bottom up*
2. Mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi
3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan level bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

(Mardiasmo, 2004:122)

Berdasarkan penjelasan di atas pengukuran kinerja di sini lebih kepada adanya komunikasi, finansial, kesepahaman dan alat pencapai tujuan. Pengukuran kinerja berdasarkan poin-poin menurut para ahli adalah untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kerangka Pemikiran

Kinerja merupakan kegiatan yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja juga mengarah selain kepada individu juga organisasi yang pada hal ini khususnya organisasi/ instansi pemerintahan. Jelas disini instansi pemerintahan di sebut sebuah organisasi sebab penjelasan mengenai organisasi itu sendiri merupakan suatu perkumpulan yang terstruktur, legal yang didalamnnya terdapat sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai rencana, visi dan misi dari organisasi/ instansi itu sendiri.

Instansi pemerintahan yang bergerak dalam penanggulangan bencana, khusunya bencana banjir sangatlah penting dalam peningkatan kinerja organisasinya sebab penanggulangan bencana merupakan terjadinya yang tidak dapat diprediksi kapan kejadiannya. Kinerja organisasi sendiri merupakan kegiatan yang sangat penting untuk

mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut untuk melihat keberhasilan kinerja BPBD Kabupaten Karawang di wilayah Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir, maka dibutuhkan indikator pengukuran kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi tersebut diantaranya *input, process, output, outcome, benefit dan impact.*

Model kinerja menurut Mashun memiliki enam faktor yang mempengaruhi kinerja, pertama yaitu *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumberdaya manusia, peralatan, material dan masukan lainya.

Kedua yaitu *process* merupakan ukuran kegiatan BPBD Kabupaten Karawang, baik dari segi kecepatan waktu penanggulangan bencana banjir, ketepatan penanggulangan bencana banjir, maupun tingkat akurasi penanggulangan bencana banjir dalam pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, yaitu *output* merupan indikator yang terdiri dari bentuk fisik dan jasa yang dihasilkan dari kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Keempat, *outcome* merupakan hasil yang dicapai dari kegiatan BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan

Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Kelima, *benefit* merupakan manfaat yang dirasakan oleh BPBD Kabupaten Karawang dan masyarakat Desa Dawuan dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Keenam, *impact* adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang baik positif maupun negatif. Jika penyelenggaraan pelayanan publik diukur dengan nilai-nilai yang baik, maka kemungkinan besar mereka akan menggunakan sistem layanan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Jika sebaliknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak diukur dengan nilai-nilai yang baik dalam menggunakan sistem layanan, proses kinerja dalam pelayanan publik akan mengalami kesulitan. Sehingga jika pengukuran terhadap tindakan telah dilakukan, maka akan diperoleh suatu tingkat kesesuaian dalam pencapaian target. Indikator-indikator pengukuran di atas sangat berpengaruh untuk melihat pencapain tujuan organi asi yang dalam hal ini instansi Pemerintahan khususnya mengenai kinerja BPBD Kabupaten Karawang di wilayah Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka definisi operasional dalam

penelitian ini adalah:

1. Kinerja adalah hasil kerja dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi bencana banjir.
2. Organisasi adalah keseluruhan dari unit kerja BPBD Kabupaten Karawang yang bekerja dalam penanggulangan banjir.
3. Kinerja organisasi adalah hasil kerja BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan banjir yang sudah memupunyai tujuan yang telah di tetapkan.
4. BPBD Kabupaten Karawang adalah organisasi Kabupaten Karawang yang di bentuk untuk menanggulangi banjir di Kabupaten Karawang.
5. Kinerja BPBD Kabupaten Karawang di wilayah Kabupaten Karawang dapat di ukur dari suatu keberhasilan dalam penanggulangan banjir.

Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

1. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Karawang di wilayah Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan. Input disini terdiri dari :
    1) Jumlah dana merupakan sesuatu yang

dibutuhkan BPBD Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir agar berjalan dengan baik.

2) Jumlah pegawai merupakan sesuatu yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3) Jumlah infrastruktur merupakan sesuatu yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

4) Jumlah waktu merupakan suatu pengukur kinerja BPBD Kabupaten karawang dalam penanggulangan bencana banjir.

2. *Process* adalah ukuran kegiatan dalam penanggulangan bencana banjir dari pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi bencana banjir *Process* disini terdiri dari :
    1) Kecepatan merupakan ukuran terhadap kinerja aparatur BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi bencana banjir.
    2) Ketepatan merupakan ukuran terhadap kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulang bencana banjir.
    3) Akurasi merupakan ukuran terhadap kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulang bencana banjir.
3. *Output* adalah hasil yang berupa bentuk fisik atau jasa dari BPBD Kabupaten Karawang didalam penangulangan bencana banjir. *Ouput* di sini terdiri dari :
    1) Bentuk fisik merupakan hasil yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Karawang dalam

penanggulangan bencana banjir.

2) Jasa yang merupakan hasil yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir .

4. *Outcome* adalah hasil yang dicapai oleh BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir, *outcome* disini terdiri dari :

1) Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari BPBD Kabupaten Karawang yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial ,bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat

2) Sosialisasi merupakan suatu proses belajaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang kepada masyarakat untuk

bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat.

3) Peraturan yang dibuat merupakan Peraturan merupakan sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

5. *Benefit* adalah manfaat yang dirasakan oleh BPBD Kabupaten Karawang dan masyarakat Desa Dawuan dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

6. *Impact* adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang terdiri dari:

1) Dampak positif merupakan kenuntungan yang didapat BPBD Kabupaten Karawang dan masyarakat dalam

keberhasilan dalam penanggulangan bencana banjir.

2) Dampak negatif merupakan kerugian yang didapat oleh masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir

Desain Penelitian

Suatu penelitian diperlukan perencanaan dalam penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis, serta efektif. Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perencanaan pelaksanaan penelitian dengan cara memilih data, mengumpulkan data, dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu.

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kinerja Badan Penanggualngan Bencana Daerah Menanggulangi Banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah kinerja BPBD dalam menanggulangi banjir tersebut.

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena menurut peneliti pendekatan kualitatif dapat memahami dalam mengambil informasi dari informan sebab peneliti mengambil data atau informasi dengan cara wawancara kepada aparatur serta masyarakat untuk diminta informasinya.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* untuk BPBD Kabupaten Karawang. Adapun informan yang berasal dari aparatur dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Pelaksana dianggap mengetahui kondisi serta masalah bencana banjir yang ada di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
2. Seksi Pencegahan dianggap memahami bagaimana penanganan menanggulangi bencana banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
3. Seksi Logistik dianggap dapat memberikan informasi bagaimana bantuan korban bencana

diberikan dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang .

4. Masyarakat Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, karena terkena dampak bencana banjir serta dianggap mengetahui kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulang bencana banjir.

Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah kinerja BPBD Kabupaten Karawang menanggulang bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Pengumpulan data juga dilakukan dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, pokok-pokok yang terdapat dalam buku, karya tulis ilmiah dengan pembahasan masalah yang diteliti di BPBD Kabupaten Karawang melalui studi pustaka peneliti akan memperoleh informasi yang diharapkan.

Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu suatu teknik pengamatan dan pencarian data secara langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat yang dilakukan oleh peneliti

secara langsung di kantor BPBD Kabupaten Karawang atau di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menanggulangi bencana banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

b. Wawancara merupakan cara memperoleh informasi melalui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan langsung. Peneliti mewawancarai aparatur yang berada di BPBD Kabupaten Karawang dan masyarakat Desa Dawuan, dengan cara melakukan tanya jawab kepada aparatur yang mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi banjir.

c. Dokumentasi, merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang diteliti berupa catatan buku-buku, majalah, koran dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi banjir.

Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melakukan cara triangulasi. Triangulasi merupakan teknik

pemeriksaaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi teknik, Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama namun melalui teknik yang berbeda. Sumber dalam triangulasi teknik ini adalah aparatur BPBD Kabupaten Karawang. Hasil data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Data dari sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik.

Teknik triangulasi ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran data tentang kinerja BPBD Kabupaten Karawang dengan menggunakan banyak teknik seperti wawancara, observasi dan lain-lain. Pengecekan tersebut dilakukan kepada narasumber yang dianggap kompeten.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dalam pengembangan teori berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini. Sesuai dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka

analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Tujuan dari analisis data untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami dan dapat mengambil kesimpulan secara tepat dan sistematis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Teknik analisis data pada bagian reduksi data ini setelah peneliti mendapatkan hasil wawancara dari narasumber, peneliti dapat merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menanggulagi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang serta mencari titik temu pembahasan masalah dalam penelitian, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya data lainya bila diperlukan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka peneliti dapat membuat penyajian data. Penyajian data peneliti melakukan susunan informasi mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menanggulangi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang kemudian peneliti melakukan penarikan sebuah kesimpulan dari informasi yang telah peneliti dapatkan dan mengubahnya serta menyusunya ke dalam bentuk uraian singkat dan bagan yang

selanjutnya peneliti buat menjadi sebuah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclution Verification* (penarikan kesimpulan)

Setelah adanya penyajian data, maka peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan yang bertujuan untuk dapat memahami kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menanggulagi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang agar dapat memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang lebih cepat.

Hasil Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah

kabupaten Karawang, dijelaskan pada pasal 38 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
    a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
    b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
    d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
    e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
   b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris, membawahkan:
   - Sub Bagian Program dan Pelaporan
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
   - Seksi Pencegahan
   - Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:

- Seksi Tanggap Darurat
- Seksi Seksi Logistik

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
   - Seksi Rehabilitasi
   - Seksi Rekonstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional

***Input* yang dibutuhkan Badan Penggulangan Bencana Daerah menanggulangi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang**

Input kinerja atau masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran. Input kinerja merupakan indikator awal penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu program-program**,** dalam hal ini program-program instansi pemerintah. Proses pelaksanaan dari visi dan misi melalui program-program memerlukan input kinerja yang banyak agar sasaran dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Input kinerja itu sendiri terdiri dari jumlah dana yang dibutuhkan/ sumber daya finansial, jumlah pegawai yang dibutuhkan atau sumber daya manusia, jumlah infrastruktur yang dibutuhkan dan jumlah waktu yang digunakan atau sumber daya waktu.

Indikator-indikator yang ada di dalam input, merupakan aspek penentu untuk pencapaian segala kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan dan program instansi pemerintahan dalam hal ini BPBD di Desan Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir dapat berjalan. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut dalam rangka menghasilkan

keluaran atau hasil. , peneliti paparkan indikator-indikator dari *input* yang meliputi jumlah dana yang dibutuhkan/ sumber daya finansial, jumlah infrastruktur yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan atau sumber daya manusia dan jumlah waktu yang digunakan atau sumber daya waktu pada sub dibawah ini :

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupten Karawang

Jumlah peralatan tentunya mempengaruhi akan kualitas kinerja dari instansi seperti BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Peralatan yang mendukung tentunya membuat semua kegiatan BPBD Kabupaten Karawang dalam melaksanakan fungsi yang diantaranya pengkomandoan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan lancar.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang mengenai sarana dan prasarana yang ada di kantor BPBD Kabupaten Karawang, aparatur mengatakan, “Peralatan yang ada di kantor BPBD Kabupaten Karawang sudah mencukupi.”(05/07/2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa terfasilitasinya perlatan-peralatan kantor yang ada di BPBD Kabupaten Karawang, sangat menunjang dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam kantor BPBD Kabupaten Karawang.

Peralatan BPBD Kabupaten Karawang selain untuk administasi perkantoran, peralatan lainnya yang digunakan di lapangan yakni untuk penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di wilayah Desa Dawuan. Jumlah peralatan dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan merupakan faktor penting. Peralatan digunakan untuk membantu dan mendukung akan keperluan-keperluan korban bencana banjir

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang mengenai peralatan dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan yang ada di kantor BPBD Kabupaten Karawang, aparatur mengatakan :

> Sarana dan prasarana atau peralatan kegiatan penanggulangan bencana banjir masih belum mencukupi, masih banyaknya kekurangan dalam peralatan kegiatan penanggulangan sehingga BPBD Kabupaten Karawang belum bisa memaksimalkan kinerjanya. (05/07/2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa peralatan untuk kegiatan BPBD Kabupaten Karawang masih bekum mencukupi, dalam kegiatan penanaggulangan bencana banjir kelengkapan peralatan sangat menunjang keberhasilan kegiatan karena dengan kelengkapan peralatan yang menunjang, kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir bisa lebih dimaksimalkan. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dawuan mengatakan:

> Menurut saya peralatan penanggulangan bencana banjir yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang masih sangat kurang, dilihat dari sedikitnya peralatan BPBD Kabupaten Karawang dalam saat penanggulngan bencana banjir. (08/07/2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa peralatan untuk kegiatan BPBD Kabupaten Karawang masih bekum mencukupi. Dilijat dari sedikitnya peralatan yang dibawa BPBD Kabupaten Karawang dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan

Berdasarkan uraian di atas maka menurut peneliti, peralatan dalam penanggulangan bencana banjir pada BPBD Kabupaten Karawang belum memberikan atau menyediakan peralatan dengan baik. Seperti Mesin Portable Sedot Air, genset, serta perhau karet. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang sebagai instansi pemerintahan yang memberikan kinerja penanggulangan bencana tentunya harus menambah peralatannya, agar kinerja yang diberikan lebih maksimal dan memberikan hasil yang baik.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Karawang

Aparatur atau pegawai merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kinerja. kinerja yang diberikan sangat tergantung kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu aparatur atau pegawai, dengan demikian aparatur dalam menciptakan kinerja harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pelaksanaan di bidangnya dan dituntut untuk melaksanakan perintah dari atasan atau pimpinan. Aparatur harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian sesuai dengan yang dimiliki agar

pelaksanaan tugas pekerjaan yang di tanganinya berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa ada keluhan dari masyarakat tentang aparatur yang melaksanakan segala tugas yang khususnya dalam melayani masyarakat.

Pengembangan profesionalisme, suatu instansi pemerintahan harus mendorong pegawai atau aparatur untuk terus menerus mengembangkan diri dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan sesuai pekerjaan yang menjadi tugas pegawai tersebut, dengan begitu suatu instansi pemerintahan dapat mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan di suatu program. Suatu instansi pemerintah seperti BPBD Kabupaten Karawang yang dalam hal ini berperan sebagai pelaksana penanggulangan bencana, salah satunya bencana banjir dapat dikatakan berhasil jika ketersediaan jumlah aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, dengan memadainya akan peralatan dan logistik, tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak di dukung oleh SDM yang memadai dalam proses pelaksanaanya. SDM mempunyai peranan penting dalam proses pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Kehandalan SDM BPBD Kabupaten Karawang mempengaruhi terhadap

kinerja instansi pemerintahan. Jumlah aparatur BPBD Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian sangat kurang.

SDM Penanggulangan Bencana yang meliputi kegiatan penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan SDM yang tinggi, meskipun begitu jumlah tersebut tentunya dalam penanggulangan bencana banjir di bilang tidak cukup untuk memadai dalam penanggulangan bencana banjir bila di kaitkan dengan jumlah penduduk di Desa Dawuan. Artinya jumlah aparatur BPBD Kabupaten Karawang Belum mecukupi jumlah aparaturnya.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang mengenai SDM yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang, aparatur mengatakan :

> aparatur yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang belum mencukupi, aparatur yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang hanya berjumlah 21 orang sehingga dalam penanggulangan bencana banjir kinerja yang diberikan BPBD terhitung memakan waktu cukup lama.
>
> (05/07/2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa aparatur yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang belum mencukupi, dilhat dari jumlah aparatur yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang hanya berjumlah 21 orang, sehingga kinerja dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir BPBD Kabupaten Karawang masih belum maksimal.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dawuan:

Aparatur yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang masih sangat kurang, dilihat dari penanggulangan bencana banjir jumlah aparatur BPBD Karawang dapat dihitung, dengan jumlah aparatur yang sedikit penanggulangan bencana banjir menjadi cukup lama. (08/07/2017)

Berdasarkan uraian di atas maka menurut peneliti bahwa aparatur yang ada di BPBD Kabupaten Karawang yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir, di lihat dari tabel 4.6 jumlah aparatur BPBD Kabupaten Karawang belum mencukupi dan perlu ditambah akan jumlah aparaturnya. Tercapainya jumlah ideal aparatur BPBD Kabupaten Karawang tentunya dapat memaksimalkan akan semua kegiatan-kegiatan penanggulangan bencanaan khususnya bencana banjir unutk wilayah Desa dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, dengan adanya penambahan aparatur BPBD Kabupaten Karawang kinerja penanggulangan bencana banjir akan meningkat dan memberikan hasil yang maksimal.

***Process* pada Badan Penggulangan Bencana Daerah menanggulangi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang**

Proses merupakan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan. Proses yang dihasilkan oleh BPBD Kabupaten Karawang di Desa Dawuan dalam penangulangan bencana banjir ialah terdiri dari segi kecepatan, ketepatan dan akurasi. Kecepatan dilihat dari bagaimana aparatur BPBD

Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir baik dari aspek kecepatan menanggapi bencana banjir maupun kecepatan penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, ketepatan dilihat dari bagaimana tepat tidaknya kineja penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karawang dalam menjalankan tugasnya, akurasi dilihat dari bagamana penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karawang akurat apa tidaknya dalam menjalankan kegiatannya tersebut.

Kecepatan BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir

Kinerja yang cepat merupakan kinerja yang harus dapat diberikan bagi kegiatan penanggulangan, Penilaian pemberian kinerja atas kegiatan penanggulangan bencana yang baik dan buruk didasarkan pada seberapa besar kemampuan penyedia kegiatan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga kinerja yang diberikan secara tepat, oleh karena itu tenaga kerja dari aparatur harus selalu bersedia mendengarkan keluhan masyarakat sehingga masyarakat tersebut akan merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik, selain itu dengan mendengarkan keluhan masyarakat bisa berguna untuk mengetahui perkembangan atas kinerja yang diberikan aparatur kegiatan penanggulangan bencana. yang nantinya akan menjadi masukan guna peningkatan kinerja.

Kinerja yang cepat merupakan suatu bentuk kinerja

yang dilaksanakan berdasarkan kecepatan dalam proses kegiatan tanpa ada kekeliruan dalam segala hal. Dalam hal ini yaitu ketepatan penanggulangan bencana danjir dimana dalam memberikan kinerja yang cepat dan tepat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat pengguna jasa layanan yaitu pemberian pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan disepakati antara aparatur dan keinginan masyarakat. Penilaian pengguna jasa atas kinerja yang baik dan buruk didasarkan pada seberapa besar kemampuan penyedia kegiatan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu tenaga kerja dari aparatur harus selalu bersedia mendengarkan keluhan masyarakat sehingga masyarakat tersebut akan merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik, selain itu dengan mendengarkan keluhan masyarakat bisa berguna untuk mengetahui perkembangan atas kinerja yang diberikan aparatur kepada masyarakat dan apa yang mereka butuhkan. yang nantinya akan menjadi masukan guna peningkatan kinerja.

Keprofesionalan seorang pegawai dapat terlihat juga dari bagaimana ia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk hal-hal yang menjadi prioritas dalam pekerjaannya sebagai pegawai pemberi layanan, kegiatan penanggulangan seharusnya menjadi prioritas nomor satu para pegawai, sehingga memberikan kinerja dengan cepat dalam penanggulangan bencana banjir.

Kecepatan kinerja merupakan ukuran dalam kegiatan yang

mengukur kecepatan dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini kecepatan di bagi menjadi dua aspek yang pertama kecepatan dalam menganggapi bencana banjir dan kecepatan penanggulangan bencana banjir, kecepatan menanggapi bencana banjir dilihat dari cepat atau tidaknya BPBD Kabupaten karawang, sedangkan untuk kecepatan penanggulangan bencana banjir itu dilihat dengan cepat atau tidaknya BPBD kabupaten Karawang dalam Menanggulangi bencana banjir.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang, mengenai kecepatan dalam menanggapi bencana banjir, aparatur mengatakan:

kecepatan dalam menanggapi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karawang sudah sudah cukup cepat, itu ditunjukan oleh siapnya satgas (satuan tugas) yang bertugas berjaga dalam wilayah-wilayah tertentu, sehingga jika terjadi bencana satgas segera melapor kepada BPBD bahwa telah terjadi bencana didaerah tersebut, BPBD Kabupaten karawang akan langsung memproses serta mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendatangi tempat kejadian bencana tersebut, sedangkan untuk kecepatan penanggulangan masih belum cepat karena kurangnya aparatur dan keterbatasan peralatan.

(05/07/2017)

Berdasarkan penjelasan dari aparatur BPBD Kabupaten Karawang bahwa dalam segi kecepatan tanggap bencana banjir aparatur BPBD berusaha memberikan yang terbaik dalam pelaksanaannya ketika ada laporan dari satgas atau masyarakat mengenai bencana banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang salahsatunya di Desa Dawuan, pihak dari BPBD dan satgas sendiri langsung bergerak cepat menuju kelapangan dan melakukan penanggulangan bencana banjir,

sedangkan dari segi penanggulangan bencana banjir masih belum maksimal dikarenakan seperti kurangnya jumlah aparatur BPBD, keterbatasan alat yang mereka punya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dawuan mengatakan:

> kecepatan dalam menanggapi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karawang sudah cepat, itu ditunjukan dengan cepatnya aparatur BPBD Kabupaten Karawang datang ke tempat kejadian dan langsung memberikan intruksi kepada masyarakat, sedangkan untuk penanggulangan bencana banjir masih kurang cepat. (08/07/2017)

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat Desa Dawuan bahwa dalam segi kecepatan tanggap bencana banjir aparatur BPBD sudah cepat, sedangkan dari segi penanggulangan bencana banjir masih belum maksimal dikarenakan seperti kurangnya jumlah aparatur BPBD dan keterbatasan alat yang mereka punya.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut peneliti bahwa kecepatan tanggap bencana BPBD kabupaten sangan cepat dilihat dari cepatnya BPBD Kabupaten Karawang datang ketempat terjadinya bencana banjir, sedangkan dari penanggulangan bencana banjir masih kurang cepat, karena di sebabkan kurangnya aparatur BPBD serta keterbatasan alat yang mereka punya, keterbatasan aparatur sangat mempengaruhi kinerja dan hasil dari kegiatan penanggulangan bencana banjir karena dengan kurangnya aparatur dapat memperlambat kegiatan penanggulangan serta kinerja yang dilakukan akan tidak maksimal.

Ketepatan BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir

Ketepatan merupakan ukuran dalam kegiatan yang mengukur ketepatan dalam melakukan suatu kegiatan dilihat dari bagaimana aparatur BPBD Kabupaten Karawang tepat atau tidaknya dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, ketepatan dilihat dari ketepatan dalam penanggulangan bencana banjir dan ketepatan dalam segi waktu.

Kinerja yang tepat merupakan suatu bentuk kinerja yang dilaksanakan berdasarkan ketepatan dalam proses kegiatan tanpa ada kekeliruan dalam segala hal. Dalam hal ini yaitu ketepatan penanggulangan bencana danjir dimana dalam memberikan kinerja yang cepat dan tepat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat pengguna jasa layanan yaitu pemberian pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan disepakati antara aparatur dan keinginan masyarakat. Penilaian pengguna jasa atas kualitas kinerja yang baik dan buruk didasarkan pada seberapa besar kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu tenaga kerja dari aparatur harus selalu bersedia mendengarkan keluhan masyarakat sehingga masyarakat tersebut akan merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik, selain itu dengan mendengarkan keluhan masyarakat bisa berguna untuk mengetahui perkembangan atas kinerja yang diberikan aparatur kepada masyarakat dan apa yang mereka butuhkan. yang nantinya akan menjadi masukan guna peningkatan kinerja.

Keprofesionalan seorang pegawai dapat terlihat juga dari bagaimana ia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk hal-hal yang menjadi prioritas dalam pekerjaannya sebagai pegawai pemberi layanan, kegiatan penanggulangan seharusnya menjadi prioritas nomor satu para pegawai, sehingga memberikan kinerja dengan cepat dalam penanggulangan bencana banjir.

. Aparatur BPBD Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara kegiatan penanggulangan bencana, salah satunya bencana banjir, yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat untuk dapat memberikan kinerja yang tepat. Salah satu harapan masyarakat yaitu kesiapan atau kesigapan serta dapat memberikan kinerja yang dijanjikan, kesigapan aparatur BPBD Kabupaten Karawang dalam menanggulangi bencana banjir, pemberian penanggulangan tepat yang diharapkan oleh masyarakat yaitu kesigapan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelaksana kegiatan BPBD Kabupaten karawang. Kesiapan atau kesigapan dari para aparatur BPBD khususnya kepada kegiatan penanggulangan bencana banjir merupakan faktor pendukung terciptanya keberhasilan kinerja dimata masyarakat. Maka dari itu masyarakat mengharapkan kinerja yang tepat dari para aparatur untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang, mengenai ketepatan dalam

menanggapi bencana banjir, aparatur mengatakan:

> ketepatan dalam penanggulangan bencana banjir sudah maksimal, dikarenakan dalam penanggulangan bencana banjir aparatur BPBD sudah tau tugasnya masing-masing sehingga setelah aparatur BPBD datang ke tempat terjadinya bencana, aparatur langsung melakukan kegiatan dalam penanggulangan banjir dan menjalankan tugasnya masing-masing, sedangkan dalam segi ketepatan waktu penanggulangan banjir sudah maksimal, dikarenakan setiap bergantinya musim panas ke musim hujan aparatur BPBD sudah siap siaga jika ada laporan terjadinya bencana banjir.
> (05/07/2017)

Berdasarkan penjelasan dari aparatur BPBD Kabupaten Karawang ketepatan dalam penanggulangan bencana banjir sudah tepat, karena aparatur BPBD Kabupaten Karawang sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, sedangkan dalam segi ketepatan waktu penanggulangan banjir sudah baik karena setiap pergantian musim BPBD sudah siap bersiaga. Bedasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dawuan mengatakan:

> ketepatan dalam penanggulangan bencana bencana banjir sudah sangat baik, dilihat dari ketepatan aparatur BPBD dalam menanggulangi banjir seperti tidak perlunya intruksi dalam pembagian tugas masing-masing, sedangkan dalam segi ketepatan waktu dalam penanggulangan banjir masih sudah cukup baik, dikarenakan setiap terjadinya bencana banjir BPBD selalu datang tepat untuk menanggulangi banjir.
> (08/07/2017)

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat Desa Dawuan ketepatan dalam penanggulangan banjir di Desa Dawuan sudah sangat baik, dilihat dari tidakperlunya pembagian tugas serta aparatur BPBD sudah mengerti tentang tugas dan fungsinya masing-masing, sedangkan dalam segi ketepatan waktu penanggulangan banjir BPBD masih kurang baik, dilihat dari

keterlambatan BPBD datang ke tempat terjadinya bencana banjir, ketepatan waktu BPBD Kabupaten Karawang datang ke tempat kejadian terkendala dari kemacetan karena banjir sehingga BPBD Kabupaten Karawang harus memakan cukup waktu lama agar sampai ke tempat terjadinya bencana banjir..

Berdasarkan wawancara dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang dengan masyarakat Desa Dawuan dapat disimpulkan bahwa ketepatan BPBD Kabupaten karawang dalam penanggulangan bencana banjir sudah baik, dilihat dari aparatur BPBD yang sudah mengerti tentang tugas dan fungsinya masing-masing, sedangkan dalam segi ketepatan waktu BPBD masih kurang baik, dilihat dari keterlambatannya datang ke tempat terjadinya bencana. Dalam ketepatan waktu BPBD Kabupaten Karawang terkendala oleh macet yang ditimbulkan oleh bencana banjir, sehingga membuat keterlambatan BPBD Kabupaten Karawang untuk datang ke tempat kejadian bencana banjir, dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang selaku instansi dalam kegiatan penanggulangan bencana harus menyelesaikan masalah keterlambatan waktu karena dengan keterlambatan waktu penanggulangan bencana banjir menjadi kurang maksimal serta dengan keterlambatan waktu masyarakat yang terkena dampak banjir mengalami kesulitan karena tidak adanya evakuasi dari BPBD Kabupaten Karawang.

***Output* yang dihasilkan Badan Penggulangan Bencana Daerah menanggulangi banjir di**

Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang

Keluaran merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. keluaran yang dihasilkan oleh BPBD Kabupaten Karawang di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dalam penangulangan bencana banjir ialah terdiri dari bentuk fisik dan jasa atau pelayanan.

Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi, peneliti paparkan indikator dari keluaran yang meliputi bantuan sosial yang diberikan, sosialisasi, kepada masyarakat dan peraturan-peraturan yang dibuat pada sub dibawah ini:

Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Desa Dawuan

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan

keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang, mengenai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Desa Dawuan, aparatur mengatakan:

> Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan bebeprapa barang diantaranya sepatu boots, jas hujan dan juga makanan dan air putih, bantuan sosial lainya yaitu pemberian dana kepada masyarakat
> (05/07/2017)

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang yaitu bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Desa Dawuan yaitu beberapa barang seperti sepatu boots, jas hujam dan juga makan seperti mie instan dan air putih serta bantuan sosial seperti pemberian dana kepada masyarakat, dengan terkendala dari dana yang dipunyai oleh BPBD Kabupaten Karawang bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Desa Dawuan menjadi kurang maksimal.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti masyarakat Desa Dawuan, mengenai bantuan sosial yang diberikan, masyarakat mengatakan:

> Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan beberapa barang seperti jas hujan, sepatu boots serta makanan dan air putih, bantuan sosial lainya yaitu dengan diberikan

uang yang berjumlah 50rb per keluarga.(08/07/2017)

Berdesarkan penjelasan hasil waancara dengan masyarakat yaitu bantuan sosial yang diberikan yaitu beberapa barang seperti jas hujan dan sepatu boots, bantuan sosial lainya yang diberikan yaitu spserti mie instan dan air putih dan dana yang berjumlah 50rb per keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut peneliti bantuan yang diberikan BPBD Kabupaten Karawang kepada masyarakat masih terkendala dana, dilihat dari masih kurangnya bantuan sosial yang diberikan, kurangnya barang-barang yang diberikan kepada masyarakat seperti sepatu boots berjumlah 150 buah dan jas hujan yang berjumlah 100 buah sedangkan masyarakat yang terkena bencana banjir lebih banyak. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang selaku instansi yang bertugas dalam penanggulangan bencana terutama bencana banjir harus segera melengkap atau menambah peralatan penanggulangan dan peralatan logistik untuk memperlancar kegiatan penanggulangan banjir serta dalam pemberian bantuan logistik seperti, spatu boots, jas hujan dan barang barang lainya yang menunjang pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir.

***Outcome* yang diberikan Badan Penggulangan Bencana Daerah menanggulangi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang**

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator seringkali rancu dengan indikator keluaran, Hasil menggambarkan

tingkat pencapaian atau hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator Hasil organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat, indikator dari hasil yang meliputi meningkatnya kerjasama antara BPBD Kabupaten Karawang dengan Dinas Binamarga dan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa Dawuan agar tidak membuang sampah sembarangan sub dibawah ini:

Meningkatknya kerjasama antara BPBD Kabupaten Karawang dengan Dinas Binamarga dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang

Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Kerjasama merupakan suatu bentuk kinerja yang dilaksanakan oleh sua instansi atau lebih berdasarkan ketepatan dalam proses kegiatan tanpa ada kekeliruan dalam segala hal. Dalam hal ini yaitu kerjasama penanggulangan bencana

banjir dimana dalam memberikan kinerja yang cepat dan tepat. Penilaian pengguna jasa atas kualitas kinerja yang baik dan buruk didasarkan pada seberapa besar kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu tenaga kerja dari aparatur harus selalu bersedia mendengarkan keluhan masyarakat sehingga masyarakat tersebut akan merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik, selain itu dengan mendengarkan keluhan masyarakat bisa berguna untuk mengetahui perkembangan atas kinerja yang diberikan aparatur kepada masyarakat dan apa yang mereka butuhkan. yang nantinya akan menjadi masukan guna peningkatan kinerja.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang, kerjasama menanggulangi bencana banjir, masyarakat mengatakan:

> Kerjasama yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang dengan Dinas Binamarga dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Dawuan sudah semakin membaik, dilihat dalam perbaikan tanggul sungai, pengerukan sungai, pelebaran gorong-gorong dan perbaikan shipon.
> (05/07/2017)

Berdasarkan penjelasan aparatur BPBD Kabupaten Karawang yaitu untuk program-program BPBD Kabupaten Karawang seperti pengerukan sungai sudah berjalan dengan baik tetapi program tersebut hanya bertahan untuk jangka waktu menengah dikarenakan derasnya air yang membawa tanah dan batu menutupi sebagian dari hasil pengerukan sungai, hasil dari program pengerukan sungai terlihat dari ketika curah hujan meningkat air yang meluap keluar dari sungai tidak

sebanyak tahun-tahun yang lalu. Program selanjutnya yaitu perbaikan shipon, perbaikan shipon sangat mempengaruhi aliran air karena dengan diperbaikannya shipon air yang berada di sungai tidak meluap terlalu banyak, dibantu oleh program penerukan sungai dan pembesaran gorong-gorong dapat meminimalkan bencana banjir yang terjadi di Disa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Meskipun penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan masih belum maksimal, tetapi BPBD Kabupaten Karawang dan Dinas Binamarga sudah memberikan kinerja maksimal terhadap penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan, kendala penanggulangan bencana banjir yaitu kurangnya aparatur BPBD dan peralatan yang dimiliki, sedangkan untuk kerjasama BPBD Kabupaten karawang dengan Dinas Binamarga sudah sangat baik dilihat dari keberhasilannya meminimalkan luapan air dari sungai cikaranggelam.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Dawuan, mengenai keluaran dalam menanggulangi bencana banjir, masyarakat mengatakan:

> Hasil dari penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karawang di Desa Dawuan yaitu bencana banjir di Desa Dawuan tidak separah tahun-tahun yang lalu, meskipun BPBD kabupaten Karawang belum bisa menyelesaikan secara menyeluruh bencana banjir di Desa dawuan tetapi hasil yang dicapai oleh BPBD Kabupaten Karwang dibilang sudah cukup baik.(08/07/2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa hasil dari penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karawang sudah cukup

baik dilihat dari banyaknya program yang sukses dijalankan oleh BPBD Kavupaten Karawang serta dapat mengurangi dampak bencana banjir di Desa Dawuan, sedangkan untuk program-program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik, seperti program pengerukan sungai di cikaranggelam itu dilakukan agar jika ketika turuh hujan yang sangat deras sungai mampu menampung air lebih banyak sehingga luapan air yang keluar dari sungai menjadi sedikit, serta perbaikan dan pelebaran shipon itu bertujuan untuk lebih memudahkan air yang mengalir melewati jembatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur BPBD Kabupaten karawang dan masyarakat Desa Dawuan dapat disimpulkan bahwa hasil dari penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karawang dengan Dinas Binamarga di Desa dawuan yaitu dengan berhasilnya kedua instansi tersebut mengurangi dampak bencana banjir yang terjadi di Desa Dawuan, meskipun penanggulangan bencana banjir belum maksimal, tetapi BPBD Kabupaten Karawang dan Dinas Binamarga berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah bencana banjir di Desa Dawuan, sedangkan untuk program-program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Karawang berjalan dengan baik. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang harus memaksimalkan kinerja penanggulangan bencana banjir, dengan menambahkan aparatur dan melengkapi perlatan untuk menanggulangi bencana banjir karena dengan begitu kegiatan dalam penanggulangan bencana banjir akan

lebih efektif dan maksimal sehingga dapat menuntaskan masalah bencana banjir yang ada di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Karawang juga sudah berjalan dengan baik, dengan adanya program-program tersebut bencana banjir yang berada di Desa Dawuan dapat diselesaikan secepatnya.

Untuk dapat menyelesaikan masalah bencana banjir yang ada di Desa Dawuan BPBD Kabupaten Karawang dan Dinas Binamarga harus berupaya untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang lebih baik lagi agar dapat menuntaskan masalah banjir yang berda di Desa Dawuan, dengan membuat program-program yang lebih efektif untuk mencegah bencana banjir terjadi.

***Benefit* yang dihasilkan Badan Penggulangan Bencana Daerah menanggulangi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang**

Manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, indikator manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal, indikator dari manfaat yang meliputi perbaikan shipon dan pelebaran gorong-gorong pada sub dibawah ini:

Manfaat perbaikan siphon di sungai Cikarnggelam di Desa

Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang

Siphon merupakan bangunan yang membawa air melewati bawah saluran lain, biasanya saluran pembuang atau jalan, Pada siphon air mengalir karena tekanan. Perencanaan hidrolis siphon harus mempertimbangkan kecepatan aliran, kehilangan kecepatan aliran pada peralihan masuk, kehilangan akibat gesekan, kehilangan pada bagian siku sipon serta kehilangan pada peralihan keluar. Diameter minimum siphon adalah 0,60 m untuk memungkinkan pembersihan dan inspeksi. Karena siphon hanya memiliki sedikit fleksibilitas dalam mengangkut lebih banyak air daripada yang direncana, bangunan ini tidak akan dipakai dalam pembuang. Walaupun debit tidak diatur, ada kemungkinan bahwa pembuang mengangkut lebih banyak benda-benda hanyut. Agar pipa sipon tidak tersumbat dan tidak ada orang atau binatang yang masuk secara kebetulan, maka mulut pipa ditutup dengan kisi-kisi penyaring.

Untuk mencegah sedimentasi kecepatan aliran dalam siphon harus tinggi. Tetapi, kecepatan yang tinggi menyebabkan bertambahnya kehilangan tinggi energi. Oleh sebab itu keseimbangan antara kecepatan yang tinggi dan kehilangan tinggi energi yang diizinkan harus tetap dijaga. Kecepatan aliran dalam sipon harus dua kali lebih tinggi dari kecepatan normal aliran dalam saluran, dan tidak boleh kurang dari 1 m/dt, lebih disukai lagi kalau tidak kurang dari 1,5 m/dt Kecepatan maksimum sebaiknya tidak melebihi 3 m/dt.

Siphon merupakan saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang, kayu atau baja maupun beton ferrocement yang didalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah dengan panjang tertentu saluran pembuang, sungai, jalan atau rel kereta api, dan sebagainya. Saluran talang minimum ditopang oleh 2 pilar atau lebih dari konstruksi pasangan batu untuk tinggi kurang 3 meter dan konstruksi pilar dengan beton bertulang untuk tinggi lebih 3 meter. Perbaikan siphon yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang dan Dinas Binamarga berjalan dengan lancar, dengan adanya perbaikan shipon di Desa Dawuan dapat mengurangi bencana banjir di Desa Dawuan.

Kinerja yang baik merupakan suatu bentuk kinerja yang dilaksanakan berdasarkan kecepatan dalam proses kegiatan tanpa ada kekeliruan dalam segala hal. Dalam hal ini yaitu program-program penanggulangan bencana banjir dimana dalam memberikan kinerja yang cepat dan tepat merupakan tugas yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Karawang selaku instansi pemerintah yang mempunyai tugas menanggulangi bencana. Penilaian pengguna jasa atas kinerja yang baik dan buruk didasarkan pada seberapa besar kemampuan penyedia kegiatan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu tenaga kerja dari aparatur harus selalu bersedia mendengarkan keluhan masyarakat sehingga masyarakat tersebut akan merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik, selain itu dengan mendengarkan keluhan masyarakat

bisa berguna untuk mengetahui perkembangan atas kinerja yang diberikan aparatur dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir dan apa yang mereka butuhkan. yang nantinya akan menjadi masukan guna peningkatan kinerja.

Keprofesionalan seorang pegawai dapat terlihat juga dari bagaimana ia memanfaatkan program-program sebaik mungkin untuk hal-hal yang menjadi prioritas dalam pekerjaannya sebagai pegawai pemberi kegiatan penanggulangan, kegiatan penanggulangan seharusnya menjadi prioritas nomor satu para pegawai, sehingga memberikan kinerja dengan cepat dalam penanggulangan bencana banjir.

Faktor benefit kinerja yang mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Karawang ialah mengenai program-program. Program perbaikan siphon menentukan keberhasilan dalam kegiatan penanggulagan bencana banjir di wilayah Desa dawuan.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan BPBD Kabupaten Karawang, mengenai manfaat dari perbaikan siphon, masyarakat mengatakan:

> Manfaat yang diberkan dari perbaikan siphon yaitu dengan mengurangi genangan air yang membanjiri Desa Dawuan, dengan adanya perbaikan shipon luapan air dari sungai cikaranggelam tidak terlalu banyak serta meningkatkan kerjasama dengan Dinas Binamarga dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir.
> (05/05/2017)

Berdasarkan penjelsasan BPBD Kabupaten Karawang manfaat yang didapat dari perbaikan siphon oleh BPBD Kabupaten Karawang yaitu mengurangi dampak bencana banjir yang terjadi di Desa Dawuan, serta dengan adanya perbaikan siphon genangan air yang

membanjiri Desa Dawuan tidak terlalu parah. Serta meningkatkan kerjasama dengan Dinas Binamarga, dengan meningkatnya kerjasama antara BPBD Kabupaten Karawang dengan Dinas Binamarga dapat menunjang dalam kegiatan penanggulangan bencana banji, meskipun terkendala dalam peralatan dan dana tapi BPBD Kabupaten Karawang dan Dinas Binamarga berusaha memberikan kinerja maksimal dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir yang berda di Desa Dawuan.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Dawuan, mengenai manfaat dari perbaikan siphon, masyarakat mengatakan:

Manfaat yang diberkan dari perbaikan siphon oleh BPBD Kabupaten Karawang yitu dengan mengurangi genangan air yang membanjiri Desa Dawuan, dengan adanya perbaikan shipon luapan air dari sungai cikaranggelam tidak terlalu banyak.

(08/07/2017)

Berdasarkan penjelsasan masyarakat Desa Dawuan manfaat yang didapat dari perbaikan shipon oleh BPBD Kabupaten Karawang yaitu mengurangi dampak bencana banjir yang terjadi di Desa Dawuan, serta dengan adanya perbaikan shipon genangan air yang membanjiri Desa Dawuan tidak terlalu parah.

Berdasrkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dauwan dapat disimpulkan bahwa manfaat yang didapat dari perbaikan siphon yaitu dapat mengurangi bencana banjir di Desa Dawuan, dengan adanya perbaikan tersebut genangan air yang membanjiri Desa dawuan sudah dapat dikurangi. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang selaku instansi penanggulangan bencana

harus meningkatkan kinerjanya agar permasalahan yang ada di Desa Dawuan dapat deselesaikan dengan cepat. Dengan kurangnya peralatan dalam penanggulangan bencana banjir pada BPBD Kabupaten Karawang belum memberikan atau menyediakan peralatan dengan baik. Seharusnya dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang sebagai instansi pemerintahan yang memberikan kinerja penanggulangan bencana tentunya harus menambah peralatannya, agar kinerja yang diberikan lebih maksimal dan memberikan hasil yang baik.

***Impact* yang diberikan Badan Penggulangan Bencana Daerah menanggulangi banjir di Desa Dauwan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang**

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik posotif maupun negatif. atau dampak yang memberikan gambaran mengenai efek langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan-tujuan program. Dampak merupakan outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga batas tertentu. Indikator kinerja dampak, mengukur outcome yang lebih makro dan melibatkan pihak lain diluar organisasi. Karena sifatnya yang tidak dikendalikan , indikator dampak boleh tidak disertai dengan target, indikator dari dampak yang meliputi dampak yang positif dan dampak negatif pada sub dibawah ini:

Kritik dan saran dari masyarakat Desa Dawuan kepada BPBD Kabupaten Karawang untuk memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana banjir

Dampak merupakan akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik positif maupun negatif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. kritik merupakan masalah penganalisa dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Atau kritik adalah tanggapan yang di sertai dengan uraian dan pertimbangan baik-buruknya sesuatu atau pendapat. Faktor keberhasilan dalam kegiatan penanggulan bencana juga ditunjang oleh kritik dari berbagai pihak terutama masyarakat, dengan adanya masukan dari masyarakat tentang hal-hal yang kurang dalam kegiatan penanggulangan bisa dapat dilihat dan dimengerti akan kekurangan dalam kinerja penanguulangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang, dengan adanya kritik dari masyarakat BPBD dapat mengetahui kekurangan serta dapat memperbaiki kekurangan dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun,mendidik,dan secara objrktif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Faktor keberhasilan dalam kegiatan penanggulan bencana juga ditunjang oleh saran dari berbagai pihak terutama masyarakat, dengan adanya saran dari masyarakat tentang hal-hal yang harus diperbaiki dalam kegiatan penanggulangan bisa dapat dilihat dan dimengerti akan kekurangan dalam kinerja penanguulangan yang dilakukan oleh

BPBD Kabupaten Karawang, dengan adanya saran dari masyarakat BPBD dapat mengetahui kekurangan serta dapat memperbaiki kekurangan dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BPBD Kabupaten Karawang, mengenai dampak dalam menanggulangi bencana banjir, masyarakat mengatakan:

> Dampak positif yaitu banyaknya masukan dari masyarakat serta instansi yang terkait dalam penanggungan bencana banjir agar lebih memaksimalkan kinerja, menambah aparatur dan memperlengkap peralatan yang dibituhkan untuk penanggulangan bencana banjir.
> (05/07/2017)

Berdasarkan penjelasan aparatur BPBD Kabupaten Karawang dampak yang ditimbulkan dari penanggulangan bencana banjir yaitu banyaknya masukan terhadap BPBD itu sendiri agar lebih bisa memaksimalkan kinerjanya dan agar dapat mentesaikan permasalahan banjir di Desa Dawuan Kecamatan cikampek Kabupaten Karawang, dengan menambah aparatur kegiatan penanggulangan bencana banjir akan lebih maksimal serta dengan memperlengkap peralatan dapat menunjang keberhasilan penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan, dengan penambahan aparatur serta perlengkapan merupakan faktor yang menunjang agar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir dapat diselesaikan dan kinerja aparatur akan meningkat.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Dawuan Kabupaten Karawang, mengenai dampak dalam menanggulangi bencana banjir, masyarakat mengatakan:

Dampak positif yang diterima masyarakat yaitu sosialisasi dari BPBD Kabupaten Karawang yang mengajarkan tentang bagaimana langkah awal untuk menanggulangi bencana banjir supaya masyarakat dapat membantu kinerja BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan banjir di Desa Dawuan, sedangkan dampak negatif dari penanggulangan bencana banjir yaitu turunya perekonomian masyarakat Desa Dawuan serta keruguan yang cukup besar. (08/07/2017)

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat Desa Dawuan dampak positif yang ditimbulkan dalam penanggulangan bencana banjir yaitu masyarakat Desa Dawuan dapat mempelajari langkah-langkah cara penanggulangan bencana banjir agar masyarakat bisa membantu aparatur BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan dikarenakan kurangnya aparatur BPBD Kabupaten Karawang sehingga penanggulngan cukup memakan waktu lama, sedangkan dampak negatif yang diterima masyarakat Desa Dawuan yaitu turunnya perekonomian serta kerugian yang cukup besar sehingga masyarakat menjadi bingung, mayoritas pencaharian masyarakat yaitu dengan bertani dan berdagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur BPBD kabupaten Karawang dan masyarakat Desa Dawuan dapat disimpulkan bahwa dampak positif yang ditimbulkan dari penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan yaitu paratur BPBD Kabupaten Karawang mendapatkan masukan terhadap kinerjanya agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana banjir, menambah aparatur sehingga dalam penanggulangan bencana banjir bisa memaksimalkan waktu dengan baik serta melengkapi peralatannya, sedangkan dampak positif untuk

masyarakat yaitu masyarakat mendapat sosialisi dari BPBD Kabupaten Karawang langkah-langkah dalam penanggulangan bencana banjir, sedangkan dampak negatif bangi masyarakat yaitu turunya perkonomian mereka. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang harus bisa memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana banjir dengan menambah aparatur dan melengkapi peralatan, dengan begitu kinerja yang dihasilkan akan lebih maksimal serta membuat hasil yang baik.

Program-program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Karawang harus dijalankan dengan baik agar bisa menyelesaikan masalah bencana banjir yang ada di Desa Dawuan, dengan berjalannya program-program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Karawang akan mengurangi dampak bencana banjir di Desa Dawuan.

Kesimpulan

1. Input jumlah dana yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang sekitar Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 20.000.000 dana yang dikucurkan tersebut untuk keperluan selama 7 hari dan jumlah SDM yang dimiliki BPBD Kabupaten Karawang sekitar 21 orang
2. Ukuran kegiatan pada BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan dan akurasi dalam penanggulangan bencana banjir.

3. Keluaran yang dihasilkan BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan dapat dilihat dari bantuan sosial kepada masyarakat, sosialisasi dan pembentukan peraturan.
4. Hasil yang dicapai dari kinerja BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan dilihat dari kerjasama antara BPBD Kabupaten Karawang dengan Dinas Binamarga dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dan partisipasi masyarakat Desa Dawuan untuk tidak membuang sampah sembarangan.
5. Manfaat yang diberikan BPBD Kabupaten Karawang mengenai penanggulangan banjir di Desa Dawuan dapat dilihat dari perbaikan shipon dan pelebaran gorong-gorong
6. Dampak yang diberikan BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi banjir di Desa Dawuan dapat dilihat dari dampak positif dan dampak negatif

Saran

1. Tambahkan sarana dan prasarana seperti perahu karet, genset, jas hujan, spatu boots, mesin

perahu dan mesin portable sedot air.

2. Disarankan agar Jumlah dana harus dikelola satu puntu langsung oleh BPBD Kabupaten Karawang.
3. Tambahkan jumlah aparatur BPBD Kabupaten Karawang dan ditingkatkan dalam kompetensinya dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Assauri, Sofyan. 2006. *Manajemen Pemasaran*: *Dasar, Konsep Dan Strategi*. Jakarta:PT.Grafindopersada.

Azwar, S. 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Edisi 2, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Dwiyanto. 2008 *Reformasi Birokrasi Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasibuan. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*.Jakarta: Bumi Aksara.

Ilham, Muh. 2008. *Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah.* Bandung: CV. Indra Prahasta.

Kodoatie, J.R. dan Sugiyanto. 2002. *Banjir, Beberapa Masalah dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta PT:BPFE-Yogyakarta.

Maryono, A. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. Yogyakarta Gajah Mada University Press.

Mahsun. 2014 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.

Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Nasution, Bismar. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi. Bandung*:Books Terrace & Library.

Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan.* Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Sukiyah. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penetapan Kawasan Rawan Banjir* Bandung: Mandar Maju

Tim Penyusun 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi & Pelaksanaan Sidang.* Edisi Revisi., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Uno, Lamatenggo. 2014. *Teori Kinerja Dan Pengukurannya. Jakarta:Bumi Aksara.*

Sudarmanto. 2015. *Kinerja Dan Pengembangan SDM.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya manusia*. Jakarta:Salemba Empat.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Parsada

Zeithaml, V. A., A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry, 1990, *Delivering Quality Services*, Free Press, New York.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

KemenPAN RI Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Dirjen RLPS Nomor 04 Tahun 2009 tentang pedoman monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai.

Perka BNPB nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan penanggulangan banjir.

Peraturan Daerah No.6 Tahun 2014 Tentang Pembetukan Struktur Organisasi Kedinasan

Rujukan Elektornik

Raka. "***Penanganan banjir di Cikampek Tidak Serius***" . 29 september 2016. http://www.antaranews.com/berita

Khumaini, Ali. "***BPBD Karawang: banjir landa tujuh desa***". 26 februari 2016. http://www.radar-karawang.com

Efendi. 2012 *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung (Suatu Studi Dalam*

Penanggulangan Bencana Banjir). Unikom, Bandung.

Musyadad. 2015. *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak.* Untirta, Serang.